



**PUTUSAN**

**Nomor XXXXXX/Pdt.G/2022/PA.Buol**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Paleleh, 03 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 04, RW. 01, Kelurahan kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**XXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Laamadong 1, 27 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Sopir Rental, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dusun 1, RT. 01, RW. 01, Desa Maniala, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register Nomor XXXXXX/Pdt.G/2022/PA.Buol. tertanggal 09 September 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan pada hari Senin, tanggal 25 November 2013, di rumah orang tua Tergugat di Desa Maniala, Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX;

1 dari 15 hal. Put. No.158/Pdt.G/2022 /PA.Buol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Maniala, Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol, selama 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Penggugat di Desa Paleleh, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, selama 5 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Maniala, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 Tahun 9 Bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 02 Februari 2014;
  - b. ANAK KEDUA, lahir tanggal 23 Oktober 2016;
4. Bahwa sejak Tahun 2016, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - Tergugat sering selingkuh / menjalani hubungan asamara dengan Wanita lain bernama Vina, Haya Raukang, Devi dan Anti;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2021 Ketika Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak sanggup lagi dengan kelakuan Tergugat yang sering selingkuh dengan wanita lain dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibanya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tetap ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

2 dari 15 hal. Put. No.158/Pdt.G/2022 /PA.Buol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Buol kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **XXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Buol sebagaimana relaas panggilan Nomor 158/Pdt.G/2022/PA. Buol., tertanggal 14 September 2022, tanggal 21 September 2022, dan tanggal 28 September 2022, yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan tahapan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula;

3 dari 15 hal. Put. No.158/Pdt.G/2022 /PA.Buol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan berupa:

1. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7205064109980003, atas nama **Sukmawati Turungku**, tanggal tanggal 02 Februari 2019, yang telah diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Buol, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dan bermaterai cukup selanjutnya disebut dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Paleleh Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Samarudin;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari hari Senin, tanggal 25 November 2013, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Maniala, Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol, selama 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Penggugat di Desa Paleleh, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, selama 5 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Maniala, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol;

4 dari 15 hal. Put. No.158/Pdt.G/2022 /PA.Buol.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: a. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 02 Februari 2014, dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 23 Oktober 2016;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, penyebabnya Tergugat sering selingkuh / menjalani hubungan asamara dengan Wanita lain bernama Vina, Haya Raukang, Devi dan Anti;
  - Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021 Ketika Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak sanggup lagi dengan kelakuan Tergugat yang sering selingkuh dengan wanita lain, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibanya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa, selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
  - Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
  - Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Lamadong I Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Samarudin;

5 dari 15 hal. Put. No.158/Pdt.G/2022 /PA.Buol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari hari Senin, tanggal 25 November 2013, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Maniala, Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol, selama 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Penggugat di Desa Paleleh, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, selama 5 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Maniala, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: a. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 02 Februari 2014, dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 23 Oktober 2016;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat sering selingkuh / menjalani hubungan asamara dengan Wanita lain bernama Vina, Haya Raukang, Devi dan Anti;
- Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021 Ketika Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak sanggup lagi dengan kelakuan Tergugat yang sering selingkuh dengan wanita lain, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;

6 dari 15 hal. Put. No.158/Pdt.G/2022 /PA.Buol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasihatan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

7 dari 15 hal. Put. No.158/Pdt.G/2022 /PA.Buol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat sering selingkuh / menjalani hubungan asamara dengan Wanita lain bernama Vina, Haya Raukang, Devi dan Anti, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021 Ketika Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak sanggup lagi dengan kelakuan Tergugat yang sering selingkuh dengan wanita lain, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I**, dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, atas nama Kartini, adalah mengenai gugatan cerai Penggugat berdasarkan bukti P.1, maka Pengadilan Agama Buol berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 .berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 55/01/XII/2013, tertanggal 02 Desember 2013, yang

8 dari 15 hal. Put. No.158/Pdt.G/2022 /PA.Buol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat/keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkar, penyebabnya Tergugat sering selingkuh /

9 dari 15 hal. Put. No.158/Pdt.G/2022 /PA.Buol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani hubungan asamara dengan Wanita lain bernama Vina, Haya Raukang, Devi dan Anti, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021 Ketika Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak sanggup lagi dengan kelakuan Tergugat yang sering selingkuh dengan wanita lain, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari hari Senin, tanggal 25 November 2013, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: a. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 02 Februari 2014, dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 23 Oktober 2016;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat sering selingkuh / menjalani hubungan asamara dengan Wanita lain bernama Vina, Haya Raukang, Devi dan Anti;
- Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021 Ketika Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak sanggup lagi dengan kelakuan Tergugat yang sering

10 dari 15 hal. Put. No.158/Pdt.G/2022 /PA.Buol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan wanita lain, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibanya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Dari keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 November 2013 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, awalnya hidup rukun dan harmonis kemudian tidak rukun dan tidak harmonis (konflik) antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering selingkuh / menjalani hubungan asamara dengan Wanita lain bernama Vina, Haya Raukang, Devi dan Anti, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021 Ketika Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama karena sudah tidak sanggup lagi dengan kelakuan Tergugat yang sering selingkuh dengan wanita lain, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibanya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarganya masing-masing, dan tidak pernah kembali lagi, maka Majelis Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan

11 dari 15 hal. Put. No.158/Pdt.G/2022 /PA.Buol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" Jo. Pasal 3 KHI yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam QS. ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tersebut di atas, maka harus dibangun di atas sendi-sendi agama yang kokoh dan kuat sehingga tidak mudah digoyah oleh pengaruh apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan ayat tersebut di atas. Dengan demikian, alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 131 ayat (2) dan 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan verstek;

12 dari 15 hal. Put. No.158/Pdt.G/2022 /PA.Buol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan yang menyebutkan bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai Sopir Rental dan memiliki Penghasilan untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat perceraian semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anak Penggugat dan Tergugat wajib bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak tersebut, adapun salah satu faktor utama untuk penunjang kelangsungan hidup anak adalah berupa materi atau nafkah yang disesuaikan dengan kebutuhan si anak, dalam hal ini Majelis menilai layak dan pantas, tuntutan Penggugat dikabulkan dengan tetap mempertimbangkan kondisi sehari-harinya Tergugat. Maka untuk menjamin kepentingan anak Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis sepakat menetapkan besarnya nafkah anak adalah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat karena anak yang bernama ANAK KEDUA, lahir tanggal 23 Oktober 2016 saat ini, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

13 dari 15 hal. Put. No.158/Pdt.G/2022 /PA.Buol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Menghukum Tergugat (XXXXXXXXXXXX) untuk membayar nafkah kepada anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK KEDUA, lahir tanggal 23 Oktober 2016, untuk setiap bulannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 Masehi, bertepatan tanggal 08 Rabiul Awwal 1444 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag, sebagai Ketua Majelis Hakim, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Mansyur, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**Muhammad Ariful Fahmi, S.HI.**

Hakim Anggota,

ttd

**Ramli Ahmad, Lc.**

Ketua Majelis,

ttd

**Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

14 dari 15 hal. Put. No.158/Pdt.G/2022 /PA.Buol.





ttd

**Mansyur, SHI.**

Perincian biaya:

1. PNPB	: Rp60.000,
2. Biaya Proses	: Rp80.000,
3. Panggilan	: Rp450.000,
4. Materai	: Rp10.000,

**Jumlah** : Rp600.000,-

(enam ratus ribu rupiah)

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA

**Drs. Arifin**

15 dari 15 hal. Put. No.158/Pdt.G/2022 /PA.Buol.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)